



PIDATO

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR TERHADAP
RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2021
JUM'AT, TANGGAL 17 SEPTEMBER 2021**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

- YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT**
- YTH. SDR. WAKIL-WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**
- YTH. REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**
- YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA OPD
DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT YANG
HADIR LANGSUNG ATAU MENGIKUTI SECARA VIRTUAL**
- YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.**

Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pagi hari ini kita kembali dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

f

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini, baik secara langsung maupun secara virtual.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara "Penyampaian Nota Pengantar Terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2021", kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 13 September 2021 yang lalu, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah menyepakati KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, KUPA-PPAS Perubahan yang telah disepakati, menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD.



Dari KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021 yang telah disepakati tersebut, terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2021, diantaranya :

1. Terdapat defisit murni sebesar Rp. 28.454.930.543,- lebih yang harus ditutup dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2021, agar terdapat keseimbangan neraca keuangan pada Perubahan APBD Tahun 2021.
2. Dalam pembahasan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021, beberapa proyeksi pendapatan daerah yang semula dikurangi, seperti Lani-Lain PAD Yang Sah yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD, Restribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan daerah Yang sah, dikembalikan lagi kepada target awal. Ini tentu perlu pendalaman dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2021 nanti.
3. Dalam KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021, anggaran untuk Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp. 107 milyar. Ini perlu dilihat dan didalami kembali,

apakah dengan sisa waktu yang tersedia, anggaran yang disediakan tersebut dapat terserap dengan maksimal.

4. Berhubungan masih cukup banyaknya kebutuhan anggaran, baik untuk defisit maupun untuk tambahan anggaran dari beberapa kegiatan strategis dan program unggulan, maka dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda, perlu dilihat kembali proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah secara tajam dan focus, agar pengalokasian anggaran dapat lebih efektif dan efisien serta tetap sasaran.
5. Perlu menjadi perhatian kita semua, bahwa dalam ketentuan Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan terhadap Perubahan APBD, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Dalam hal DPRD dan Kepala Daerah tidak dapat mengambil keputusan sesuai dengan jadwal tersebut, maka Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan. Artinya, tidak ada Perubahan APBD.



Demikianlah beberapa hal sebagai pengantar Rapat Paripurna ini yang dapat kami sampaikan. Sesuai dengan agenda utama Rapat Paripurna ini, marilah kita berikan kesempatan kepada Saudara Gubernur, untuk menyampaikan Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2021.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur, kami persilahkan.

.....

Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Perubahan
APBD Tahun 2021

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2021.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati;

Dengan telah disampaikannya Nota Pengantar terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2021, maka sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasannya, dilanjutkan dengan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.



Berhubung terbatasnya waktu dalam penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2021, maka sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, akan kita laksanakan pada hari ini, pukul 16.00 wib.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kepada Fraksi-Fraksi untuk dapat segera menyiapkan Pandangan Umum Fraksinya yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna sore hari nanti.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati;

Dengan telah disampaikannya Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2021, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada siang hari ini dan kami ingatkan kepada Saudara Gubernur serta hadirin sekalin, pada pukul 16.00 wib nanti, kita kembali akan melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2021. Untuk itu, mohon kehadirannya kembali pada Rapat Paripurna tersebut.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, kami informasikan juga bahwa pada Rapat Paripurna tanggal 13 September 2021 yang lalu, Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan usulan perubahan keanggotaan Fraksinya pada Komisi I dan Komisi IV.

Berhubung perubahan keanggotaan Fraksi PAN pada Komisi IV merupakan Ketua Komisi IV, maka sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (7) Peraturan Tata Tertib DPRD, dilakukan kembali pemilihan Ketua Komisi oleh dan dari Anggota Komisi.

Berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh Anggota Komisi IV, ditetapkan Ketua Komisi IV Sdr. H. Muzli M Nur, S.Pd, sebagai Ketua Komisi IV sisa masa jabatan Pimpinan Komisi IV. Penetapan Sdr. H. Muzli M Nur, S.Pd tersebut, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 10/Kep.Pimp/DPRD-2021.

Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbilalamin, Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini, secara resmi kami tutup.

Terima kasih
Billahitaufiq walhidayah
Wassalam'mualikum wr.wb

16
09-21.